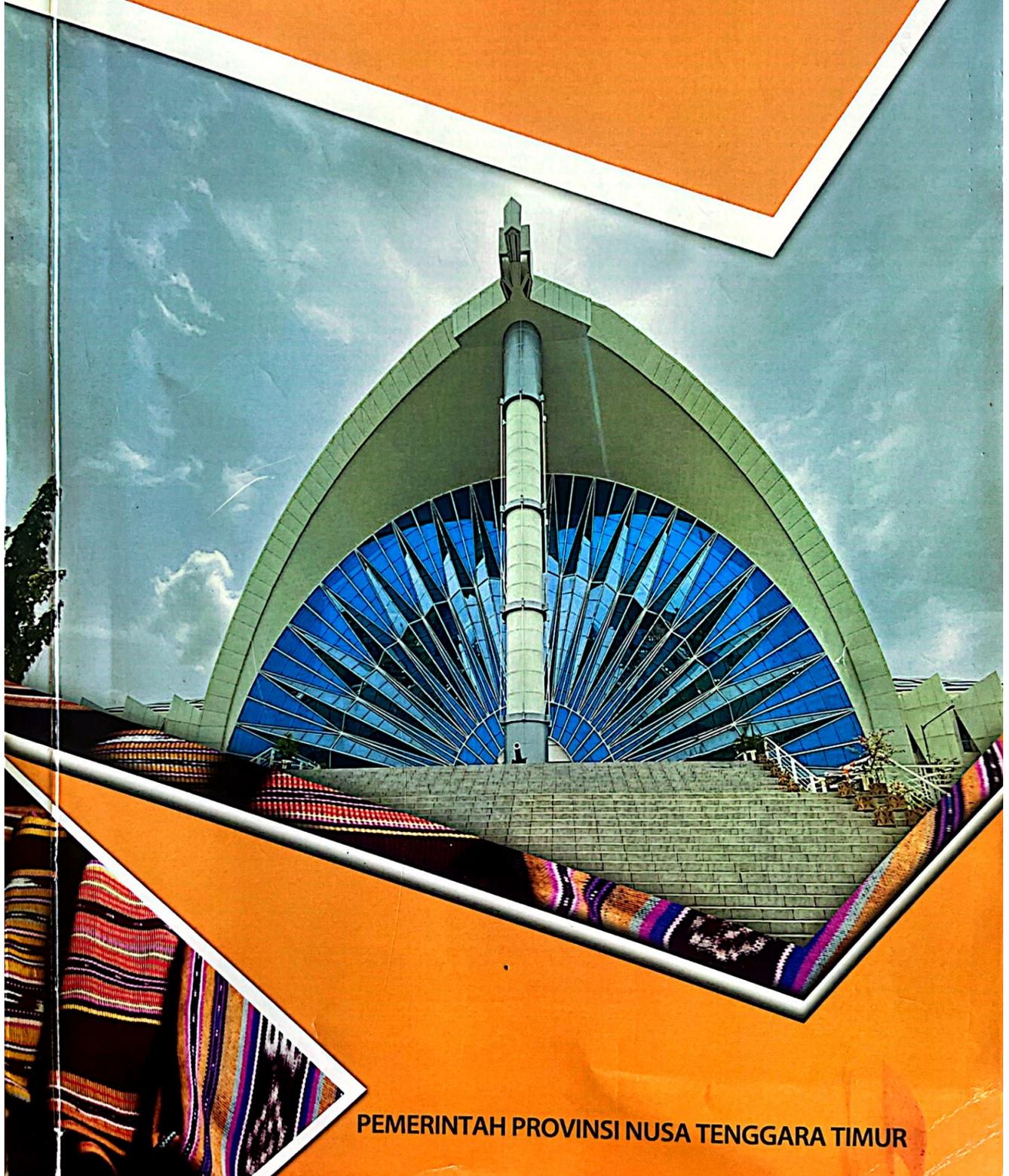


**LAPORAN KEUANGAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (LK-SKPD)**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**(UNAUDITED)**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menegaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berbasis akrual yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur). Penyusunan Laporan Keuangan yang disajikan saat ini merupakan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Periode Januari sampai dengan Desember) untuk mengetahui Kinerja SKPD selama satu tahun dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Demikian Laporan Keuangan Tahun 2023 ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur/  
Pengguna Anggaran

  
Lecky Frederich Kof STP  
Perdana Utama Madya  
NIP. 196402101986031029

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dibidang keuangan dalam kerangka menuju tata kelola yang baik.

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan beberapa informasi yang disyaratkan berupa penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
4. PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
  8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  9. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
  10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
  11. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan dan Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi NTT.
- 1.3 **Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD**

**Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

**Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**Bab III Penjelasan pos – pos laporan keuangan SKPD**

- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 3.1.1 Pendapatan - LRA
  - 3.1.2 Belanja

### 3.2 Laporan Operasional (LO)

#### 3.2.1 Pendapatan - LO

#### 3.2.2 Beban LO

### 3.3. Neraca

#### 3.3.1 Aset Lancar

#### 3.3.2 Aset Tetap

#### 3.3.3. Aset-aset Lain

#### 3.3.4 Kewajiban

### 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

## BAB IV. Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan SKPD

## BAB V. Penutup.

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor: DPPA/B.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 15 November 2022. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan rincian sebagai berikut:

##### A. Pendapatan

Target pendapatan untuk Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.3.100.000.000,00 lebih kecil dari target pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.872.244.000,00 atau turun sebesar 20 %. Realisasi pendapatan hingga tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp.1.739.422.917,00 atau 56,11% dari target sebesar Rp. Rp.3.100.000.000,00

Jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

I. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direalisasi sebesar Rp. 655.808.817,00 atau 102,47 % dari target Rp. 640.000.000,00 terdiri dari:

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan bangunan :

01. Kantor Dinas

✓ Sewa Rumah Dinas direalisasi Rp. 30.000.000,00 atau 68,97 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 43.500.000,00

- ✓ Sewa Gerai Pangan/Kantin direalisir Rp. 16.500.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16.500.000,
2. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
- ✓ Jasa Pengawasan direalisir sebesar Rp. 38.705.650,00 atau 119,09 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.32.500.000,00
  - ✓ Jasa Legalitas Label TPH direalisir sebesarRp. 4.850.467,00 atau 107 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,-
  - ✓ Jasa Determinasi Pohon Induk direalisir sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,00
  - ✓ Jasa Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan direalisir sebesar Rp.12.672.700,00 atau 49,69 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 25.500.000,00
3. UPTD Proteksi TPH dan Perkebunan :
- ✓ Sewa Laboratorium direalisir sebesar Rp. 55.250.000,00 atau 110,50 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,-
4. UPT Perbenihan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan :
- ✓ Jasa Laboratorium Hayati direalisir sebesarRp. 6.706.000,00 atau 67,06 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-
5. Retribusi pemakaian alat mesin pertanian
- ✓ Jasa pemakaian alat mesin pertanian direalisir sebesar Rp. 491.124.000,00 atau 110,36 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 445.000.000,00,-

II. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa UPT Perbenihan Kebun Dinas dan Laboratoium Hayati Perkebunan direalisir sebesar Rp. 94.880.000,00 atau 84,71 % dari target Rp. 112.000.000,00

III. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah direalisir sebesar Rp. 988.734.100,00 atau 42,11 % dari target Rp.2.348.000.000,00 terdiri dari:

1. UPT. Perbenihan TPH terealisasi sebesar Rp 820.371.000 atau 38 % dari target 2.154.873.600 yang terdiri dari:

✓ Penjualan Hasil kebun di Balai Benih TP (padi, jagung, kedele dan kacang hijau) direalisir sebesar Rp. 322.590.000,00 atau 34,34 % dari target sebesar Rp. 939.467.500,00

✓ Penjualan Hasil kebun di BBH Tanaman Hortikultura (Jeruk, Mangga, Durian), direalisasi sebesar 321.250.000,00 atau 49,83 % dari target Rp 644.662.500,00

✓ Lain-lain Penerimaan direalisasi Rp 176.531.000 atau 30,93 % dari target sebesar Rp.570.743.600,00

2. UPT Perbenihan, kebun Dinas dan Lab Hayati Pertanian

✓ Penjualan Hasil Kebun Dinas pada UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati ( cengkeh, kopi, kakao, jambu mete, kelapa/kopra, lain-lain penjualan hasil produksi direalisir sebesar Rp. 168.363.100,00 atau 87,18 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 193.126.400,00

## **B. Belanja**

Rencana belanja yang dialokasikan untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 74.720.980.332,00,- dan Realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar

Rp 65.374.470.056,00 atau 87,49 % dari target . Belanja daerah yang direalisasi terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 51.017.026.312 atau sebesar 87,64 % dari anggaran sebesar Rp 58.210.386.982,00 dan belanja modal terealisasi sebesar Rp 14.457.443.744,00 atau sebesar 86,96 % dari anggaran sebesar Rp 16.510.593.350,00. Perincian realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

**1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi direalisasi sebesar Rp.39.840.825.183,00 atau 93,08 % dari target sebesar Rp. 42.799.275.667,00 yang dirinci sebagai berikut :**

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp. 62.270.000,00 atau 64 % dari target sebesar Rp. 96.880.360,00
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari gaji dan tunjangan ASN direalisasi sebesar Rp 29.010.944.769,00 atau 81,99 % dari target Rp 31.724.887.000,00
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah Direalisasi sebesar Rp 117.310.453,00 atau 81 % dari target sebesar Rp 144.388.600,00
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor direalisasi sebesar Rp. 4.020.600,00 atau 63 % dari target sebesar Rp.6.371.200,00
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan direalisasi sebesar Rp. 18.566.150,00 atau 73 % dari target sebesar Rp. 25.371.100,00
  - Penyediaan Bahan/Material direalisasi sebesar Rp. 45.158.045,00 atau 83 % dari target sebesar Rp. 54.700.800,00
  - Fasilitas Kunjungan Tamu direalisasi sebesar Rp. 10.803.158,00 atau 59 % dari target sebesar Rp. 18.276.000,00,00
  - Penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD direalisasi sebesar Rp 38.762.500,00 atau 98 % dari target Rp 39.669.500

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam bentuk peralatan dan mesin direalisasikan sebesar Rp 80.308.000,00 atau 96 % dari target Rp 83.638.000,00
- e. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan sebesar Rp. 10.450.403.685,00 atau 99 % dari target sebesar Rp. 10.537.912.207,00 yang juga dapat dirinci sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasikan sebesar Rp. 2.231.000,00 atau 89 % dari target sebesar Rp.2.508.600,00
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik direalisasikan sebesar Rp. 362.524.985,00 atau 89 % dari target sebesar Rp. 407.571.607,00.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasikan sebesar Rp. 10.085.647.700,00 atau 99 % dari target sebesar Rp10.127.832.000,00
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan direalisasikan sebesar Rp. 6.839.104,00 atau 98 % dari target sebesar Rp. 6.985.000,00
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direalisasikan sebesar Rp. 111.529.172,00 atau 60 % dari target sebesar Rp.184.891.900,00
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya direalisasikan sebesar Rp. 1.220.000,00 atau 6 % dari target sebesar Rp.19.692.600,00

**Rincian Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
TA.2023**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo	%
1	2	3	4	5	6
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74.720.980.332,00	65.313.841.344,00	9.407.138.988,00	87,41
	<b>01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>42.799.275.667,00</b>	<b>39.779.896.471,00</b>	<b>3.019.379.196,00</b>	<b>92,95</b>
	01.1.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.880.360,00	62.270.000,00	34.610.360,00	64,28

<b>01.1.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>		<b>96.880.360,00</b>	<b>62.270.000,00</b>	<b>34.610.360,00</b>	<b>64,28</b>
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.998.000,00	1.998.000,00	-	100,00
2	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00
3	Belanja Lembur	27.520.000,00	27.272.000,00	248.000,00	99,10
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.362.360,00	-	34.362.360,00	0,00
<b>01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>31.724.887.000,00</b>	<b>28.950.016.057,00</b>	<b>2.774.870.943,00</b>	<b>91,25</b>
<b>01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>		<b>31.724.887.000,00</b>	<b>28.950.016.057,00</b>	<b>2.774.870.943,00</b>	<b>91,25</b>
1	Belanja Gaji Pokok PNS	18.143.456.940,00	17.485.709.396,00	657.747.544,00	96,37
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	719.213.390,00	673.764.400,00	90.917.190,00	87,36
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.597.981.308,00	1.553.836.684,00	44.144.624,00	97,24
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	80.046.344,00	74.093.956,00	10.925.874,00	86,35
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	392.700.000,00	328.360.000,00	64.340.000,00	83,62
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	576.943.500,00	235.280.000,00	341.663.500,00	40,78
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	809.340.000,00	772.530.000,00	36.810.000,00	95,45
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	54.386.500,00	50.900.000,00	6.916.500,00	87,28
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.547.263.802,00	1.466.966.480,00	80.297.322,00	94,81
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	74.628.722,00	65.853.440,00	13.239.922,00	82,26
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.121.918,00	15.492.411,00	-370.493,00	102,45
12	Belanja Pembulatan Gaji PNS	934.085,00	232.197,00	701.888,00	24,86
13	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.946,00	15.791,00	1.196,00	92,50
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	988.764.840,00	696.979.698,00	291.785.142,00	70,49
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	39.868.848,00	27.194.983,00	14.828.727,00	62,81
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	37.323.684,00	35.668.447,00	1.655.237,00	95,57
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.479.528,00	1.376.376,00	212.269,00	85,65
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	111.971.052,00	107.006.293,00	4.964.759,00	95,57
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.438.572,00	4.129.320,00	636.618,00	85,66
20	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	77.757.672,00	-	77.757.672,00	0,00

21	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	3.082.344,00	-	3.082.344,00	0,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.522.842.522,00	2.372.745.230,00	150.097.292,00	94,05
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	158.253.399,00	144.681.406,00	13.571.993,00	91,42
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	118.177.248,00	108.278.179,00	9.899.069,00	91,62
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.449.123.780,00	2.693.856.619,00	755.267.161,00	78,10
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	106.771.056,00	95.993.463,00	10.777.593,00	89,91
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	19.200.000,00	-	19.200.000,00	0,00
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	3.360.000,00	-	3.360.000,00	0,00
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	70.440.000,00	-	70.440.000,00	0,00
<b>01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>144.388.600,00</b>	<b>117.310.453,00</b>	<b>27.078.147,00</b>	<b>81,25</b>
<b>01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>		<b>6.371.200,00</b>	<b>4.020.600,00</b>	<b>2.350.600,00</b>	<b>63,11</b>
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.371.200,00	4.020.600,00	2.350.600,00	63,11
<b>01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>		<b>25.371.100,00</b>	<b>18.566.150,00</b>	<b>6.804.950,00</b>	<b>73,18</b>
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	25.371.100,00	18.566.150,00	6.804.950,00	73,18
<b>01.1.06.07. Penyediaan Bahan/Material</b>		<b>54.700.800,00</b>	<b>45.158.045,00</b>	<b>9.542.755,00</b>	<b>82,55</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.454.600,00	6.369.100,00	85.500,00	98,68
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.588.200,00	28.572.045,00	8.016.155,00	78,09
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.945.600,00	5.627.000,00	318.600,00	94,64
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.219.800,00	150.000,00	1.069.800,00	12,30

5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.082.200,00	4.029.500,00	52.700,00	98,71
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	410.400,00	410.400,00	-	100,00
<b>01.1.06.08. Fasilitas Kunjungan Tamu</b>		<b>18.276.000,00</b>	<b>10.803.158,00</b>	<b>7.472.842,00</b>	<b>59,11</b>
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	560.000,00	4.480.000,00	11,11
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.236.000,00	10.243.158,00	2.992.842,00	77,39
<b>01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>		<b>39.669.500,00</b>	<b>38.762.500,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>97,71</b>
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.969.500,00	1.062.500,00	907.000,00	53,95
2	Belanja Sosialisasi	37.700.000,00	37.700.000,00	-	100,00
<b>01.1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>83.638.000,00</b>	<b>80.308.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>96,02</b>
<b>01.1.01.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>		<b>83.638.000,00</b>	<b>80.308.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>96,02</b>
1	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.550.000,00	8.550.000,00	-	100,00
2	Belanja Modal Alat Pendingin	9.310.000,00	9.310.000,00	-	100,00
3	Belanja Modal Personal Computer	43.890.000,00	40.960.000,00	2.930.000,00	93,32
4	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	21.888.000,00	21.488.000,00	400.000,00	98,17
<b>01.1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>10.537.912.207,00</b>	<b>10.450.403.685,00</b>	<b>87.508.522,00</b>	<b>99,17</b>
<b>01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>		<b>2.508.600,00</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>88,93</b>
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.508.600,00	2.231.000,00	277.600,00	88,93
<b>01.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>		<b>407.571.607,00</b>	<b>362.524.985,00</b>	<b>45.046.622,00</b>	<b>88,95</b>
1	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6.336.000,00	6.336.000,00	-	100,00
2	Belanja Tagihan Air	28.043.000,00	12.875.500,00	15.167.500,00	45,91
3	Belanja Tagihan Listrik	373.192.607,00	343.313.485,00	29.879.122,00	91,99
<b>01.1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>		<b>10.127.832.000,00</b>	<b>10.085.647.700,00</b>	<b>42.184.300,00</b>	<b>99,58</b>
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	56.520.000,00	56.520.000,00	-	100,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	25.110.000,00	24.760.000,00	350.000,00	98,61
3	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00

	Menghasilkan Pendapatan				
4	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	33.645.700,00	15.209.000,00	18.436.700,00	45,20
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	74.100,00	-	74.100,00	0,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.048.900,00	2.131.100,00	917.800,00	69,90
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.394.000,00	-	2.394.000,00	0,00
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.968.000,00	648.000,00	1.320.000,00	32,93
9	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	15.000.000,00	9.300.000,00	5.700.000,00	62,00
10	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	15.300.000,00	2.700.000,00	85,00
11	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	52.000.000,00	52.000.000,00	-	100,00
12	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.456.000.000,00	9.451.200.000,00	4.800.000,00	99,95
13	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.835.000,00	-	2.835.000,00	0,00
14	Belanja Paket/Pengiriman	15.750.900,00	13.950.000,00	1.800.900,00	88,57
15	Belanja Lembur	13.783.000,00	13.472.000,00	311.000,00	97,74
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	378.240.000,00	377.760.000,00	480.000,00	99,87
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	22.694.400,00	22.665.600,00	28.800,00	99,87
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	28.368.000,00	28.332.000,00	36.000,00	99,87
<b>01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>211.569.500,00</b>	<b>119.588.276,00</b>	<b>91.981.224,00</b>	<b>56,52</b>
<b>01.1.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>		<b>6.985.000,00</b>	<b>6.839.104,00</b>	<b>145.896,00</b>	<b>97,91</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.245.000,00	3.186.700,00	58.300,00	98,20
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.600.000,00	2.512.404,00	87.596,00	96,63

<b>01.1.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>		<b>184.891.900,00</b>	<b>111.529.172,00</b>	<b>73.362.728,00</b>	<b>60,32</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.399.900,00	24.398.842,00	35.001.058,00	41,08
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	342.000,00	57.000,00	285.000,00	16,67
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.800.000,00	6.118.155,00	4.681.845,00	56,65
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	99.420.000,00	80.355.175,00	19.064.825,00	80,82
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.320.000,00	-	14.320.000,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.000,00	600.000,00	10.000,00	98,36
<b>01.1.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>		<b>19.692.600,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>18.472.600,00</b>	<b>6,20</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.812.600,00	-	14.812.600,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	1.220.000,00	3.660.000,00	25,00

**2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat direalisasikan sebesar Rp. 359.831.750,00 atau 54 % dari target sebesar Rp. 662.000.000,00 yang dirinci sebagai berikut :**

Promosi Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi melalui Media Provinsi dalam bentuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, edukasi dan sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) direalisasikan sebesar Rp. 359.831.750,00 atau 54 % dari target sebesar Rp.662.000.000,00

**Rincian Belanja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat TA.2023**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Saldo</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>662.000.000,00</b>	<b>359.831.750,00</b>	<b>302.168.250,00</b>	<b>54,36</b>
	<b>03.1.04. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>	<b>662.000.000,00</b>	<b>359.831.750,00</b>	<b>302.168.250,00</b>	<b>54,36</b>
	<b>03.1.04.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</b>	<b>662.000.000,00</b>	<b>359.831.750,00</b>	<b>302.168.250,00</b>	<b>54,36</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	120,00	-	120,00	0,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.753.400,00	889.350,00	864.050,00	50,72
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.581.100,00	1.004.800,00	1.576.300,00	38,93
4	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	521.912.500,00	292.271.000,00	229.641.500,00	56,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.905.000,00	-	2.905.000,00	0,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132.847.880,00	65.666.600,00	67.181.280,00	49,43

**3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Direalisasikan Sebesar Rp 10.172.393.934,00 atau 73 % dari target Rp 13.927.671.505,00**

- a. Pengawasan peredaran sarana pertanian dalam bentuk Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian direalisasikan sebesar Rp 10.172.393.934,00 atau 95,41 % dari target Rp 13.927.671.505,00

- b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman direalisasikan sebesar Rp. 6.825.391.081,00 atau 69 % dari target sebesar Rp. 9.845.635.835,00 yang terdiri dari:
- Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultural direalisasikan sebesar Rp 520.819.600,00 atau 85 % dari target Rp 615.063.295,00
  - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan direalisasikan sebesar Rp 4.898.257.405,00 atau 65 % dari target Rp 7.544.030.680,00
  - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan direalisasikan sebesar Rp 1.406.314.076,00 atau 83 % dari target Rp 1.686.541.860,00

**Rincian Belanja Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian TA.2023**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo	Persentase
1	2	3	4	5	6
<b>2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>13.927.671.505,00</b>	<b>10.172.393.934,00</b>	<b>3.755.277.571,00</b>	<b>73,04</b>
<b>02.1.01. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>		<b>4.082.035.670,00</b>	<b>3.347.002.853,00</b>	<b>735.032.817,00</b>	<b>81,99</b>
<b>02.1.01.01. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</b>		<b>4.082.035.670,00</b>	<b>3.347.002.853,00</b>	<b>735.032.817,00</b>	<b>81,99</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.390.400,00	10.390.400,00	-	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.319.200,00	4.266.200,00	1.053.000,00	80,20
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.878.970,00	7.468.900,00	1.410.070,00	84,12
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.587.500,00	1.587.500,00	-	100,00
5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.911.150.000,00	3.209.820.080,00	701.329.920,00	82,07
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.709.600,00	113.469.773,00	31.239.827,00	78,41

<b>02.1.02. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>		<b>9.845.635.835,00</b>	<b>6.825.391.081,00</b>	<b>3.020.244.754,00</b>	<b>69,32</b>
<b>02.1.02.02. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura</b>		<b>615.063.295,00</b>	<b>520.819.600,00</b>	<b>94.243.695,00</b>	<b>84,68</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	798.400,00	798.400,00	-	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	-	1.026.000,00	0,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	79.800,00	58.000,00	21.800,00	72,68
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	513.600,00	90.000,00	423.600,00	17,52
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.346.800,00	3.830.800,00	516.000,00	88,13
7	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	478.400.000,00	477.876.000,00	524.000,00	99,89
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.121.835,00	-	7.121.835,00	0,00
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.766.860,00	31.156.400,00	84.610.460,00	26,91
10	Belanja Modal Mesin Proses	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00
<b>02.1.02.03. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan</b>		<b>7.544.030.680,00</b>	<b>4.898.257.405,00</b>	<b>2.645.773.275,00</b>	<b>64,93</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	76.437.000,00	70.497.000,00	5.940.000,00	92,23
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.206.400,00	54.522.898,00	1.683.502,00	97,00
3	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	9.225.000,00	9.225.000,00	-	100,00
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.968.000,00	11.968.000,00	-	100,00
5	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	4.674.000,00	4.674.000,00	-	100,00
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.343.600,00	1.343.600,00	-	100,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7.506.900,00	7.506.900,00	-	100,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	633.937.800,00	17.373.950,00	616.563.850,00	2,74

9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	75.359.319,00	31.522.950,00	43.836.369,00	41,83
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.237.600,00	3.228.000,00	9.600,00	99,70
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	14.270.000,00	3.600.000,00	10.670.000,00	25,23
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.449.600,00	22.388.000,00	61.600,00	99,73
13	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.650.000.000,00	1.622.698.750,00	27.301.250,00	98,35
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	438.402.000,00	244.735.000,00	193.667.000,00	55,82
15	Belanja Pakaian Olahraga	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00
16	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	0,00
17	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.149.680.000,00	357.160.000,00	792.520.000,00	31,07
18	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	95.700.000,00	93.300.000,00	2.400.000,00	97,49
19	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.037.000,00	1.037.000,00	-	100,00
20	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	38.250.000,00	38.250.000,00	-	100,00
21	Belanja Paket/Pengiriman	7.425.000,00	5.432.000,00	1.993.000,00	73,16
22	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
23	Belanja Sewa Tractor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
24	Belanja Sewa Excavator	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00
25	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00
26	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.086.800,00	2.590.800,00	11.496.000,00	18,39
27	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.100.000,00	400.000,00	1.700.000,00	19,05
28	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	56.500.000,00	49.300.000,00	7.200.000,00	87,26
29	Belanja Bimbingan Teknis	31.668.000,00	-	31.668.000,00	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	37.980.000,00	37.672.469,00	307.531,00	99,19

	Dinas Bermotor Perorangan				
31	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.038.736.661,00	2.143.981.088,00	894.755.573,00	70,56
<b>02.1.02.04. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan</b>		<b>1.686.541.860,00</b>	<b>1.406.314.076,00</b>	<b>280.227.784,00</b>	<b>83,38</b>
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.500.000,00	-	13.500.000,00	0,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	228.000,00	228.000,00	-	100,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.461.600,00	960.000,00	501.600,00	65,68
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	672.000,00	638.400,00	33.600,00	95,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	598.491.400,00	581.533.000,00	16.958.400,00	97,17
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	113.297.400,00	80.995.900,00	32.301.500,00	71,49
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.096.500,00	4.785.800,00	1.310.700,00	78,50
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.414.940,00	29.533.800,00	19.881.140,00	59,77
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.565.000,00	2.188.800,00	376.200,00	85,33
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.643.900,00	13.350.700,00	2.293.200,00	85,34
11	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.440.000,00	69.440.000,00	-	100,00
13	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
14	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.850.000,00	2.204.650,00	1.645.350,00	57,26
15	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	146.034.000,00	138.054.000,00	7.980.000,00	94,54
16	Belanja Tagihan Air	7.600.000,00	6.460.000,00	1.140.000,00	85,00
17	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	23.370.000,00	14.022.000,00	9.348.000,00	60,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	501.697.120,00	329.019.026,00	172.678.094,00	65,58
19	Belanja Modal Mesin Proses	97.180.000,00	96.900.000,00	280.000,00	99,71

20	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
----	--------------------------------------	--------------	--------------	---	--------

**4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian direalisasikan sebesar Rp. 14.816.044.791,00 atau 87 % dari target sebesar Rp.17.015.773.000,00 yang dirinci sebagai berikut :**

Penataan Prasarana Pertanian dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya direalisasikan sebesar Rp. 14.816.044.791,00 atau 87 % dari target sebesar Rp. 17.015.773.000,00.

**Rincian Belanja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian TA.2023**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo	Persentase
1	2	3	4	5	6
	<b>3.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>17.015.773.000,00</b>	<b>14.816.044.791,00</b>	<b>2.199.728.209,00</b>	<b>87,07</b>
	<b>03.01.01. Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>17.015.773.000,00</b>	<b>14.816.044.791,00</b>	<b>2.199.728.209,00</b>	<b>87,07</b>
	<b>03.1.01.10. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya</b>	<b>17.015.773.000,00</b>	<b>14.816.044.791,00</b>	<b>2.199.728.209,00</b>	<b>87,07</b>
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.800.000,00	660.000,00	1.140.000,00	36,67
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.450.000,00	12.400.000,00	50.000,00	99,60
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	332.175.690,00	331.750.000,00	425.690,00	99,87
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	49.459.500,00	32.954.000,00	16.505.500,00	66,63
5	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	221.450.460,00	221.200.000,00	250.460,00	99,89
6	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	32.973.000,00	21.982.000,00	10.991.000,00	66,67

7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000,00	24.174.047,00	20.825.953,00	53,72
8	Belanja Modal Mesin Proses	172.500.000,00	-	172.500.000,00	0,00
9	Belanja Modal Electric Generating Set	90.000.000,00	89.990.000,00	10.000,00	99,99
10	Belanja Modal Mesin Bor	15.250.000,00	15.185.000,00	65.000,00	99,57
11	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	20.000.000,00	18.500.000,00	1.500.000,00	92,50
12	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	165.000.000,00	135.209.000,00	29.791.000,00	81,94
13	Belanja Modal Alat Panen	904.600.000,00	854.223.744,00	50.376.256,00	94,43
14	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.915.000.000,00	1.901.000.000,00	14.000.000,00	99,27
15	Belanja Modal Alat Pendingin	85.000.000,00	-	85.000.000,00	0,00
16	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	348.000.000,00	347.500.000,00	500.000,00	99,86
17	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	270.000.000,00	256.000.000,00	14.000.000,00	94,81
18	Belanja Modal Personal Computer	160.000.000,00	159.120.000,00	880.000,00	99,45
19	Belanja Modal Sumur Pemboran	1.566.217.500,00	880.109.000,00	686.108.500,00	56,19
20	Belanja Modal Baju Pengaman	90.000.000,00	89.900.000,00	100.000,00	99,89
21	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.041.937.850,00	4.557.338.000,00	484.599.850,00	90,39
22	Belanja Modal Bangunan Gudang	2.769.459.000,00	2.402.730.000,00	366.729.000,00	86,76
23	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.995.000.000,00	1.865.420.000,00	129.580.000,00	93,50
24	Belanja Modal Bangunan Terbuka	712.500.000,00	598.700.000,00	113.800.000,00	84,03

**5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian direalisasikan sebesar Rp 185.674.398,00 atau 59 % dari target Rp 316.260.160,00 terdiri**

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi dalam bentuk pengendalian organisme pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan .

**Rincian Belanja Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian  
TA.2023**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Saldo	Persentase
1	2	3	4	5	6
	<b>5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>316.260.160,00</b>	<b>185.674.398,00</b>	<b>130.585.762,00</b>	<b>58,71</b>
	<b>05.1.01. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	<b>316.260.160,00</b>	<b>185.674.398,00</b>	<b>130.585.762,00</b>	<b>58,71</b>
	<b>05.1.01.01. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>	<b>316.260.160,00</b>	<b>185.674.398,00</b>	<b>130.585.762,00</b>	<b>58,71</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	285.000,00	285.000,00	-	100,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.461.000,00	2.225.000,00	236.000,00	90,41
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.596.000,00	5.704.500,00	891.500,00	86,48
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	9.425.000,00	9.425.000,00	-	100,00
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.002.200,00	9.579.700,00	422.500,00	95,78
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.453.500,00	1.453.500,00	-	100,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.464.900,00	1.460.900,00	4.000,00	99,73
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.815.500,00	5.276.750,00	2.538.750,00	67,52
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.258.100,00	1.439.900,00	818.200,00	63,77
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.163.200,00	3.747.200,00	416.000,00	90,01
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.402.000,00	17.812.000,00	5.590.000,00	76,11
12	Belanja Obat-Obatan-Obat	760.000,00	752.000,00	8.000,00	98,95
13	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.860.000,00	1.664.000,00	196.000,00	89,46

14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.550.000,00	12.320.000,00	10.230.000,00	54,63
15	Belanja Tagihan Air	380.000,00	280.000,00	100.000,00	73,68
16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	220.632.760,00	111.497.948,00	109.134.812,00	50,54
17	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	751.000,00	751.000,00	-	100,00

## 2.2 Hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum anggaran belanja yang tidak dapat direalisasikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi keuangan daerah yang tidak stabil.
2. Adanya refocusing anggaran sebagai kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kestabilan keuangan pemerintah daerah.

## BAB III

### PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 3.1.1 Pendapatan- LRA

Jumlah pendapatan selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.739.422.917,00 atau 56,11 % dari target sebesar Rp. 3.100.000.000,00. Dari sejumlah obyek pendapatan yang ada terdapat obyek pendapatan yang mencapai target 100% atau di atas 100% untuk jangka waktu sampai dengan Desember 2023. Adapun pendapatan yang mencapai target 100% atau di atas 100% dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Pendapatan pada bagian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**, meliputi:
  - a. Kantor Dinas berupa Sewa Gerai Pangan/Kantin dapat terealisasi sebesar Rp 16.500.000,00 atau mencapai 100 % karena telah beroperasi secara normal dan pembayarannya tepat waktu.
  - b. UPTD Pengawasan dan sertifikasi benih pada bagian pengawasan terealisasi Rp 38.705.750 atau 119 % dari target sebesar Rp 32.500.000. Penerimaan tersebut melampaui target karena tingginya permintaan pemeriksaan dan jasa pengujian pada bagian laboratorium.
  - c. UPTD Proteksi TPH dan Perkebunan melampaui target sebesar Rp 52.500.000 atau 105 % dari target sebesar Rp. 50.000.000,00. Penerimaan tersebut melampaui target karena kenaikan sewa laboratorium.
  - d. Retribusi pemakaian alat mesin pertanian melampaui target sebesar Rp 491.124.000, atau 267,70 dari target sebesar Rp 445.000.000,-. Penerimaan ini melampaui target karena tingginya permintaan masyarakat terhadap penggunaan mesin pertanian.

## 2) Pendapatan pada hasil retribusi penjualan produksi usaha daerah

### a. UPT Perbenihan TPH.

Pendapatan yang mencapai target dan melampaui target pada sektor ini bersumber dari hasil penjualan padi sebesar Rp 71.289.000,- atau 124,74 % dari target Rp 57.150.000,-, pucuk entris mangga sebesar Rp 13.500.000,- atau 540 % dari target Rp 2.500.000,-, entris durian sebesar Rp 2.750.000,- atau 130,95 % dari target Rp 2.100.000,-.

### b. UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Lab.Hayati Perkebunan

Pendapatan yang mencapai melampaui target pada sektor ini bersumber dari hasil penjualan kelapa/kopra sebesar Rp 19.331.000,- atau 153,34 % dari target Rp 12.606.400 dan hasil penjualan kopi sebesar Rp 11.739.000,- atau 113,64 % dari target sebesar Rp. 10.330.000,-.

## **Pendapatan yang tidak mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**

### 1) Pendapatan pada bagian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi:

Realisasi pendapatan jasa laboratorium hayati secara kumulatif dari Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.706.000,00 atau 67,06 % dari target Rp.10.000.000,00. Realisasi yang tidak mencapai target disebabkan karena kurangnya sewa jasa penggunaan laboratorium oleh konsumen.

### 2) Pendapatan pada bagian Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bibit atau Tanaman meliputi:

#### a. UPT Perbenihan TPH

- Penjualan Hasil Kebun Dinas (Benih/Bibit) Kantor Dinas (Benih Padi dan Jagung) terealisasi sebesar Rp. 820.371.000,00 atau 38,07 % dari target yang ditetapkan sebesar

Rp. 2.154.873.600,00. Tidak tercapainya target PAD pada sektor ini disebabkan oleh produktivitas rendah akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama penyakit serta kekeringan yang berkepanjangan. Penjualan Hasil Kebun di BBH Tanaman Hortikultura (Jeruk) terealisasi sebesar Rp. 323.250.000,00 atau 49,83 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 644.662.500,00. Tidak tercapainya target pada sektor ini disebabkan karena belum semua anakan jeruk laku terjual.

- Lain lain Penerimaan (Padi, Jagung, Lengkeng, Sawo/Abiu, Jeruk, Mangga, Durian, Pucuk Entris dan Tanaman Hias (Palem dan Mawar) terealisasi sebesar Rp. 176.531.000,00 atau 30,93 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 570.743.600,00 . Tidak tercapainya target sektor ini disebabkan oleh produktivitas tanaman menurun akibat serangan penyakit dan kekeringan yang berkepanjangan serta adanya refocusing anggaran dari pemerintah pusat.
- UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan :

Penjualan Hasil Kebun Dinas UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan (Jambu Mete) terealisasi sebesar Rp. 11.009.100,00 atau 87,18 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 21.840.000,00. Tidak tercapainya target pada sektor ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Rendahnya alokasi anggaran untuk biaya perawatan tanaman.
- Terbatasnya alokasi sarana dan prasarana produksi.
- Tidak tersedianya input seperti pupuk dan obat-obatan
- Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman yang disebabkan oleh populasi tanaman yang sudah tua,

serangan hama dan penyakit tanaman lainnya serta dampak perubahan iklim.

- Dampak perubahan iklim seperti kekeringan atau hujan angin pada fase pembungaan tanaman.

### 3.1.2 Belanja- LRA

Belanja yang dialokasikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 74.720.980.332,00 terealisasi sebesar Rp. 65.374.470.056,00 atau 87,49 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.346.510.276,00

Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai berikut:.

#### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan Belanja Hibah

Belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 51.017.026.312,00 atau 87,64 % dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 58.210.386.982,00

a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.29.094.624.769,00 atau 91,43 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 31.822.417.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 21.922.401.543,00 atau 83,08 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.26.387.969.982,00

2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 14.357.443.744,00 atau 86,96 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16.510.593.350,00 terdiri dari

a. Belanja modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp 4.933.255.744,00 atau 82,33 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.991.696.500,00.

- b. Belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp 9.424.188.000,00 atau 89,59 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 10.518.896.850,00

## **3.2 Laporan Operasional**

### **3.2.1 Pendapatan Daerah – LO**

Pendapatan daerah – LO Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 5.760.038.917,00 atau 100 %, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Daerah (PAD) - LO, periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.1.740.922.917,00 atau 100 %
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO, periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp.4.019.116.000 atau 100 %.

### **3.2.2 Beban Daerah- LO**

Beban daerah LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban LO sebesar Rp. 57.708.009.788.90,00 atau 100 % dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Beban Pegawai LO merupakan, beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.29.094.624.769,00 atau 100 % yang terdiri dari beban gaji dan tunjangan ASN- LO sebesar Rp 23.595.389.872,00; beban tambahan penghasilan ASN-LO sebesar Rp 5.415.554.897,00; tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN-LO sebesar Rp.83.680.000,00.

2. Beban Barang Jasa merupakan beban barang jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 22.113.082.043,00 yang terdiri dari beban barang LO terealisasi sebesar Rp.7.353.985.923,00; beban jasa LO terealisasi sebesar Rp 11.820.583.594,00 dan beban pemeliharaan LO sebesar Rp 119.847.644,00.
3. Beban perjalanan dinas LO merupakan beban perjalanan dinas periode 1 Januari s/ 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 2.818.664.882,00.-
4. Beban Penyusutan dan Amortasi adalah nilai penyusutan aset tetap periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.500.302.976,90 yang terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin LO sebesar Rp 5.735.059.735.61 dan beban penyusutan gedung dan bangunan LO sebesar Rp 645.742.868.86; beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi LO sebesar Rp107.068.372.43 dan beban amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp 12.432.000

### 3.3.Neraca SKPD

#### 3.3.1 Aset :

Jumlah aset sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berjumlah Rp 113.783.306.585,68 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 8.667.890.029,12 jika dibandingkan dengan nilai aset 2022 sebesar Rp 105.115.416.556,56 atau naik sebesar 8,66 %.

#### 1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 159.642.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 186.680.500 jika dibandingkan dengan aset lancar tahun 2022 sebesar Rp 346.322.500. Aset lancar terdiri dari:

##### a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas pada Bendaharawan Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp.0,00 jumlah tersebut merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang hingga 31 Desember

2022 belum dipertanggungjawabkan secara definitif ke kas daerah pada tanggal neraca.

**b. Piutang Retribusi Daerah**

Piutang retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 477.625.000,00 terdiri dari piutang peralatan dan mesin pertanian pada kelompok tani yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca senilai Rp 469.375.000,00 dan piutang sewa penggunaan gerai senilai Rp.8.250.000,00.

**c. Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. (469.375.000,00)

**d. Persediaan**

Jumlah persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp 159.642.000 terdiri dari persediaan berupa :

1. Persediaan Benih sebesar Rp. 159.642.000,00 yang merupakan persediaan berupa benih tanaman pangan terdiri dari :

- a. Benih padi Ciherang di kabupaten Ngada sebanyak 1.190 Kg senilai Rp 17.850.000,00 berlabel dan 1.200 kg dormansi senilai Rp 18.000.000 serta 350 kg dikabupaten Sumba Timur senilai Rp 3.500.000 dormansi.
- b. Benih jeruk di BBH Oelbuk kabupaten TTS sebanyak 30.073 pohon senilai Rp 120.292.000

**3.3.2 Aset Tetap**

**a. Aset Tetap Tanah**

Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.42.720.582.350,00

**b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Saldo awal aset tetap peralatan dan mesin per 1 Januari 2023 sebesar Rp. 56.617.499.847,00 sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 61.639.705.592,00 atau bertambah sebesar Rp 5.022.205.745,00 dan

akumulasi penyusutan sebesar Rp 39.105.116.686,48 sehingga nilai buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp 22.534.588.905,52.

c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo awal asset tetap gedung dan bangunan per 1 Januari 2023 sebesar Rp.33.552.562.060,41 dan saldo akhir per 31 Desember sebesar Rp 45.006.695.443,22 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 11.451.133.382,81; akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp 7.508.969.292,98 sehingga nilai buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp 37.497.726.150,23.

d. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan:

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2023 sebesar Rp.3.904.024.918,00 dan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.904.024.918,00 serta akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.137.261.703 sehingga nilai buku tahun 2023 sebesar Rp 2.766.763.215.

e. Aset Tetap Lainnya:

Saldo aset tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.48.391.300,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.48.391.300,-

3.3.3.Aset Lainnya

Aset lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar, investasi permanen dan asset tetap pada tanggal neraca. Aset lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.019.268.664,92 sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.855.305.944,92 atau meningkat sebesar Rp 163.962.720,-. Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud sebesar Rp. 92.425.750,00, Aset lain-lain sebesar Rp.7.981.972.664,92 dan Akumulasi Amortasi Aset Tidak berwujud sebesar Rp. (55.129.750,00)

### 3.3.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai saat akhir tahun anggaran. Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp 28.094.000

### 3.3.5. Ekuitas

#### Ekuitas

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 113.783.306.585,68 mengalami peningkatan sebesar Rp 8.659.640.029,12 jika dibandingkan dengan ekuitas 2022 sebesar Rp 105.115.416.556,56 atau naik 8,66 %.

### 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas Awal sebesar	Rp. 105.115.416.556,56
RP PPKD	Rp. 63.635.047.139,00
Surplus/Defisit LO sebesar	Rp. (51.947.970.871,90)
Dampak Perubahan Aset Tetap sebesar	Rp. (672.852.616,19)
Dampak Perubahan atas Penyusutan sebesar	Rp.(2.353.083.621,79)
Dampak Perubahan atas penyisihan piutang	Rp. 6.750.000,00
Ekuitas Akhir sebesar	Rp. 113.783.306.585,68

## BAB IV

### PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

#### 1. Profil SKPD

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasar Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi NTT, dengan susunan Organisasi terdiri dari:

- 1). Kepala Dinas/eselon II : 1 orang
  - 2) Sekretaris/Kepala Bidang /Kepala UPTD/eselon III : 9 orang
  - 3) Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi: 13 orang:
  - 4) Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum
2. Adanya penghapusan 2 unit kendaraan roda 4 yang kondisinya masih baik dengan SK nomor 288/KEP/HK/2023, 2-08-2023
  3. Adanya penghapusan alat berat yang kondisinya rusak berat (RB) sebanyak 5 unit, 1 unit truk dan 2 unit motor dengan SK nomor 288/KEP/HK/2023, 2-08-2023
  4. Hibah Kementerian perkebunan dengan BAST Nomor 1114/PL130/E/12/2021, terdapat sejumlah barang yang kondisinya rusak berat dialihkan ke aset lainnya baik nilai perolehan dan akumulasi penyusutan.
  5. Penarikan/mutasi keluar 1 unit kendaraan roda 4 ke BPAD
  6. Adanya perbedaan jumlah realisasi belanja yang ada pada SPJ Fungsional tahun 2023 dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 senilai Rp 300.000,00. Perbedaan ini disebabkan karena adanya temuan BPK pada saat audit tahun 2023 pada pos perjalanan dinas dan telah ditindaklanjuti dengan setoran ke kas negara. (Bukti setor terlampir).
  7. Terdapat persediaan benih padi dan jagung yang tidak lulus uji dan dijual konsumsi.

BAB V  
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan SKPD unauditet ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



*Lecky Frederich Koh* STP  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196402101986031029

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanian  
Provinsi Nusa Tenggara Timur/  
Pengguna Anggaran



**Lecky Frederich Isoli, STP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196402101986031029